

Determinan Kemiskinan di Wilayah Kepulauan: Peran Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah di Provinsi Maluku

Maximiliane Leonora Cornelia Hukum¹⁾, Samie Lambert Jacobs²⁾

¹⁾ Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Maluku, Indonesia

²⁾ STIA Trinitas, Ambon, Maluku, Indonesia

nanehukom@gmail.com

Abstract: *Poverty remains a major development challenge, particularly in geographically fragmented regions such as Maluku Province, Indonesia. This study examines the effects of economic growth, the Human Development Index (HDI), and government expenditure on poverty levels across 11 regencies/cities in Maluku Province during 2019–2023. Using a quantitative approach, this study applies panel data regression analysis estimated through the appropriate model selection procedures. The findings reveal that economic growth, HDI, and government expenditure significantly influence poverty reduction. However, the positive relationship between economic growth and poverty indicates that economic expansion has not yet generated inclusive benefits for vulnerable groups. Similarly, improvements in human development have not been fully transformed into productive employment opportunities and income enhancement. Government expenditure demonstrates an important role in reducing poverty through public investment and social development programs. These findings highlight the importance of integrated policies that combine inclusive economic growth, human capital development, and effective fiscal management to achieve sustainable poverty reduction in island regions.*

Keywords: *Economic Growth, Human Development Index, Government Spending, Poverty.*

Abstraksi; Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan, terutama pada wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan seperti Provinsi Maluku, Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel melalui pemilihan model estimasi yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun, hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat yang inklusif bagi kelompok masyarakat miskin. Peningkatan IPM juga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan akibat keterbatasan kesempatan kerja produktif. Sementara itu, belanja pemerintah berperan penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi terpadu melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan manusia, dan pengelolaan fiskal yang efektif.

Kata Kunci; *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah, Kemiskinan.*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan pembangunan telah diimplementasikan, distribusi hasil pembangunan yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan ekonomi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah.

Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tingkat kemiskinan relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku pada tahun 2023 mencapai 16,42 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, terdapat disparitas tingkat kemiskinan yang cukup besar antar kabupaten/kota. Kota Ambon memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, sedangkan beberapa kabupaten kepulauan masih mencatat tingkat kemiskinan yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan yang tersebar, terbatasnya konektivitas antarwilayah, tingginya biaya transportasi dan distribusi, serta ketimpangan akses terhadap pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa determinan kemiskinan di wilayah kepulauan berpotensi berbeda dengan wilayah daratan, sehingga memerlukan kajian empiris yang lebih kontekstual.

Secara teoritis, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Literatur ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendorong investasi, serta meningkatkan produktivitas sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan yang dihasilkan. World Bank, (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif menurunkan kemiskinan apabila bersifat inklusif, yaitu mampu menciptakan kesempatan kerja produktif, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperluas peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin. Sebaliknya, pertumbuhan yang tidak inklusif cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan sehingga manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi (United Nations Development Programme [UNDP], 2023). Selain pertumbuhan ekonomi, pendekatan pembangunan manusia yang dikembangkan UNDP menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diyakini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang ekonomi, dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis melalui kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Zouhar et al., 2021). Namun, efektivitas belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, ketepatan sasaran program, efisiensi pelaksanaan, dan sinergi antarkebijakan pembangunan.

Berbagai penelitian empiris telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, belanja pemerintah, dan kemiskinan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Wibowo & Ridha, 2021; Sayyidina et al., 2023). Penelitian lain juga menemukan bahwa belanja pemerintah berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Miar & Yunani, 2020; Isnowati et al., 2023). Namun demikian, bukti empiris mengenai pengaruh belanja pemerintah masih menunjukkan hasil yang beragam. Oktavia et al., (2024), misalnya, menemukan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan tidak selalu signifikan dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah serta efektivitas implementasi kebijakan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara belanja pemerintah dan kemiskinan masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama pada wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda.

Meskipun hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, belanja pemerintah, dan kemiskinan telah banyak dikaji dalam literatur ekonomi pembangunan, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Bukti empiris mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan

masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa belanja pemerintah berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan kualitas implementasinya.

Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada wilayah dengan karakteristik geografis yang relatif berbeda dari daerah kepulauan. Akibatnya, mekanisme pengaruh pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan pada wilayah yang menghadapi keterbatasan konektivitas, tingginya biaya distribusi, serta ketimpangan akses terhadap pelayanan publik masih belum dipahami secara memadai. Di samping itu, penelitian terdahulu umumnya menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara terpisah sehingga masih terbatas bukti empiris yang menjelaskan kontribusi ketiga faktor tersebut secara simultan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan pada wilayah kepulauan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara simultan pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang berfokus pada wilayah daratan atau hanya menguji masing-masing determinan secara parsial, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi kemiskinan dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik pembangunan, aksesibilitas, dan tantangan geografis yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan, khususnya mengenai determinan kemiskinan pada wilayah kepulauan. Selain memberikan kontribusi akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan karakteristik pembangunan wilayah kepulauan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku, baik secara parsial maupun simultan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kemiskinan pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik pembangunan berbeda dengan wilayah daratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan sekaligus menjadi dasar empiris bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Kajian Teori

Kemiskinan

Perkembangan teori kemiskinan dalam literatur ekonomi pembangunan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis pendapatan (*income poverty*) menuju pendekatan kemiskinan multidimensional (*multidimensional poverty*). Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai deprivasi dalam pendidikan, kesehatan, standar hidup, akses terhadap pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi. Pendekatan multidimensional dinilai lebih mampu menjelaskan kompleksitas kesejahteraan masyarakat karena mempertimbangkan berbagai dimensi pembangunan yang saling berkaitan (D'Attoma & Matteucci, 2024).

Implikasinya, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat semata, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta menciptakan kesempatan ekonomi



yang lebih inklusif. Dengan demikian, kemiskinan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh interaksi antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kebijakan fiskal pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan kualitas pembangunan manusia memperkuat produktivitas dan kapasitas individu dalam memanfaatkan peluang ekonomi, sedangkan belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen redistribusi melalui penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pengurangan kemiskinan sangat ditentukan oleh sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2022; UNDP, 2023).

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Literatur ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak bersifat linier, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan apabila bersifat inklusif, yaitu mampu menciptakan kesempatan kerja produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi, serta mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata. Sebaliknya, pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu cenderung meningkatkan ketimpangan sehingga kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas (World Bank, 2022; UNDP, 2023).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi, distribusi pendapatan, kualitas institusi, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan apabila diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja, pemerataan akses ekonomi, dan pengurangan ketimpangan antarkelompok maupun antar wilayah (Fosu, 2017; Dollar et al., 2016).

Pada negara berkembang, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan karena manfaat pertumbuhan masih terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh pembangunan manusia yang berkualitas serta kebijakan fiskal yang efektif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu determinan utama yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesempatan ekonomi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan

Literatur ekonomi pembangunan menempatkan IPM sebagai indikator yang merepresentasikan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut merupakan modal dasar yang menentukan kemampuan individu untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan pendapatan. Dalam perspektif *capability approach*, pembangunan manusia bertujuan memperluas kebebasan dan kapabilitas individu sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kondisi kemiskinan (Sen, 1999; UNDP, 2023).

Secara teoritis, peningkatan IPM akan memperluas kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi sekaligus mengurangi berbagai bentuk deprivasi yang menjadi penyebab kemiskinan. Namun, efektivitas pembangunan manusia dalam menurunkan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia

cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan apabila manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat (World Bank, 2022).

Pada negara berkembang, termasuk wilayah kepulauan, hubungan antara IPM dan kemiskinan menjadi lebih kompleks karena peningkatan capaian pembangunan manusia belum tentu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan apabila masih terdapat kesenjangan akses terhadap infrastruktur, pasar tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM perlu didukung oleh kebijakan yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan manusia dipandang sebagai salah satu determinan utama dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan ekonomi.

Belanja Pemerintah dan Kemiskinan

Dalam perspektif ekonomi publik, belanja pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang publik, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta program perlindungan sosial. Namun, literatur ekonomi pembangunan menegaskan bahwa efektivitas belanja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas alokasi, efisiensi pelaksanaan, dan ketepatan sasaran program. Belanja yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dan pembangunan modal manusia (*human capital*) cenderung memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dibandingkan belanja yang kurang produktif (Barro, 1990; IMF, 2023).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pemerintah dan kemiskinan masih menghasilkan temuan yang beragam karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, serta komposisi pengeluaran pemerintah. Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar terbukti lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan peningkatan belanja pemerintah secara agregat. Sebaliknya, pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau kurang efisien cenderung memberikan dampak yang terbatas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks negara berkembang, efektivitas belanja pemerintah sangat bergantung pada tata kelola fiskal, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kualitas belanja publik menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang lebih inklusif melalui peningkatan pelayanan publik, pemerataan kesempatan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan (World Bank, 2022).

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa tingkat kemiskinan merupakan hasil interaksi antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia, dan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah.

Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses terhadap aktivitas ekonomi produktif. Sementara itu, peningkatan IPM memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, sehingga masyarakat memiliki kapabilitas yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan keluar dari kondisi kemiskinan.

Di sisi lain, belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan



program perlindungan sosial. Efektivitas belanja pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas alokasi anggaran, efisiensi pelaksanaan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat, sehingga mampu memperkuat dampak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terhadap penurunan kemiskinan.

Berdasarkan landasan teoritis dan sintesis hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode 2019–2023. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data tersebut membentuk *balanced panel* yang terdiri atas 11 unit *cross section* dan lima periode pengamatan sehingga menghasilkan 55 observasi.

Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi variasi antarwilayah (*cross section*) dan antarwaktu (*time series*) secara simultan, sehingga menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dibandingkan penggunaan data *cross section* atau *time series* secara terpisah.

Hubungan konseptual antarvariabel dinyatakan sebagai berikut:

$$KMSKN = f(PRTEK, IPM, BP)$$

Selanjutnya, model empiris penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$KMSKN_{it} = \beta_0 + \beta_1 PRTEK_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 BP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Transformasi logaritma natural diterapkan pada variabel belanja pemerintah untuk mengurangi perbedaan skala data, meningkatkan stabilitas varians, mengurangi potensi heteroskedastisitas, serta mempermudah interpretasi koefisien regresi.

Keterangan;

- KMSKN : Tingkat kemiskinan (%)
- PRTEK ; Pertumbuhan ekonomi (%)
- IPM ; Indeks Pembangunan Manusia
- BP ; Belanja Pemerintah (Rupiah)
- ln (BP) ; Logaritma natural belanja pemerintah
- β_0 ; Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$; Koefisien regresi
- ε ; *Error term*
- I ; Kabupaten/kota
- T ; Tahun pengamatan

Estimasi model dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Model terbaik dipilih secara bertahap menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Model yang terpilih selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis.

Sebelum pengujian hipotesis, model dievaluasi melalui uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan estimator memenuhi asumsi dasar regresi data panel. Selanjutnya dilakukan uji parsial (uji *t*) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen, uji simultan (uji *F*) untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama, serta

koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.

Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Uji Normalitas (One Sample Kolmogorow Sminow Test)

<i>Asymp Sig (2 tailed)</i>	,200^{cd}
-----------------------------	--------------------------

Sumber; Data diolah, (2025)

Angka 0,200 pada tabel hasil uji Kologorov-Smirnov menunjukkan probabilitas bahwa perbdaan antara distribusi data dengan distribusi normalmterjadi secara kebetulan, artinya bahwa dapat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Dalam pengujian statistik, tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05, artinya risiko 5% menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin–Watson (DW) untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada model regresi. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 1.969. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, nilai tersebut berada di antara batas atas (dU) dan $4 - dU$, sehingga menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, residual dalam model bersifat independen dan model regresi telah memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengandung gejala multikolinearitas, karena korelasi yang tinggi antarvariabel independen dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	Ketentuan	VIF	Ketentuan	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0,911	$\geq 0,10$	1,097	$\geq 0,10$	Tdk terjawab
IPM (X2)	0,680	$\geq 0,10$	1,471	$\geq 0,10$	Tdk terjawab
Belanja Pemerintah (X3)	0,689	$\geq 0,10$	1,452	$\geq 0,10$	Tdk terjawab

Sumber; Data diolah, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10, yaitu sebesar 0,911 untuk pertumbuhan ekonomi, 0,680 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 0,689 untuk belanja pemerintah. Selain itu, seluruh nilai VIF juga berada di bawah 10, masing-masing sebesar 1,097, 1,471, dan 1,452. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas sehingga variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja pemerintah layak digunakan dalam analisis regresi data panel.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan pada setiap tingkat pengamatan. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed), di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Hasil Sig 2-Tailed	Ketentuan	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0,983	$\geq 0,05$	Tdk Terjadi Heterokedastisitas
IPM (X2)	0,829	$\geq 0,05$	Tdk Terjadi Heterokedastisitas
Belanja Pemerintah (X3)	0,863	$\geq 0,05$	Tdk Terjadi Heterokedastisitas

Sumber; Data diolah, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) untuk variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah masing-masing sebesar 0,983; 0,829; dan 0,863. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis regresi menghasilkan nilai koefisien yang menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan sebagai akibat perubahan masing-masing variabel independen dengan asumsi variabel lainnya berada dalam kondisi tetap.

Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
1 (Constant)	6,101	4,170
Pertumbuhan _ekonomi	,056	,019
IPM	,207	,065
Belanja _Pemerintah	-4,059E-6	,000

Sumber; Data diolah, (2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KMSKN} = 6,101 + 0,056\text{PRTEK} + 0,207\text{IPM} - 4,059\text{E-6BP} + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,101 menggambarkan nilai dasar tingkat kemiskinan ketika seluruh variabel independen dalam model dianggap konstan. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,056 menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,056 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Selanjutnya, variabel IPM memiliki koefisien regresi sebesar 0,207 yang menunjukkan arah hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan

IPM dalam model penelitian ini diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,207 satuan, dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah tetap.

Sementara itu, variabel belanja pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar $-4,059E-6$ yang menunjukkan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin besar alokasi belanja pemerintah, maka tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan.

Secara umum, hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki arah hubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan belanja pemerintah memiliki arah hubungan negatif. Namun, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, maka dilakukan pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

Uji Koefisien Determinan (R Square)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang semakin besar dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,986	0,973	0,963

Sumber; Data diolah, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,973 yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 97,3%, sedangkan sisanya sebesar 2,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,963 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model, kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja pemerintah, secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, di mana model dinyatakan berpengaruh secara simultan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$).

Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	41,747	3	13,916	95,579	,000 ^b
Residual	1,165	8	,146		
Total	42,912	11			

Sumber; Data diolah, (2025)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 95,579 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, model regresi yang



digunakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama.

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, di mana variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji t Parsial

Variabel	t hitung	t tabel	Sig
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	2,968	2,306	0,018
IPM (X2)	3,176	2,306	0,013
Belanja Pemerintah (X3)	-15,652	2,306	0,000

Sumber; Data diolah, (2025)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t hitung sebesar 2,968 dengan tingkat signifikansi 0,018. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai t hitung sebesar 3,176 dengan tingkat signifikansi 0,013. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel belanja pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar -15,652 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan arah hubungan negatif yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mencerminkan pertumbuhan yang inklusif karena peningkatan output ekonomi belum secara optimal diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja produktif, pendapatan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan konektivitas, biaya logistik yang tinggi, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Struktur ekonomi yang masih banyak bergantung pada sektor primer dengan produktivitas relatif rendah menyebabkan manfaat pertumbuhan cenderung lebih mudah dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan aktivitas ekonomi produktif. Sementara itu, kelompok masyarakat miskin yang sebagian besar bergantung pada sektor informal belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengurangi kemiskinan apabila tidak disertai dengan kebijakan yang mendorong pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif melalui penguatan sektor produktif berbasis masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan pandangan World Bank, (2022), United Nations Development Programme, (2022), dan Organisation for Economic Co-operation and Development, (2023) yang menegaskan bahwa

pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan apabila mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Evita dan Primadana, (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh positif terhadap kemiskinan ketika manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. Dengan demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tantangan utama pembangunan di Provinsi Maluku bukan hanya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara inklusif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Nilai koefisien regresi sebesar 0,207 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan IPM diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,207 satuan dengan asumsi variabel lain dalam model tetap. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan dengan ekspektasi teoritis, di mana peningkatan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah penelitian.

Secara ekonomi, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin. Fenomena ini dapat terjadi karena peningkatan kualitas sumber daya manusia belum diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja produktif, transformasi struktur ekonomi, dan perluasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan konektivitas, dominasi sektor primer, serta terbatasnya aktivitas ekonomi bernilai tambah menjadi faktor yang dapat membatasi dampak pembangunan manusia terhadap pengurangan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan perspektif *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen, yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan kondisi penting bagi kesejahteraan, tetapi tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan tanpa dukungan kesempatan ekonomi yang memadai. Sejalan dengan World Bank, (2022) dan United Nations Development Programme, (2023), pembangunan manusia akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja produktif, dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dengan demikian, peningkatan IPM di Provinsi Maluku perlu disertai dengan kebijakan yang mendorong transformasi ekonomi, penguatan sektor produktif masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja agar peningkatan kualitas manusia dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan. Pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan kapasitas ekonomi lokal menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan manusia dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2013–2023. Koefisien regresi sebesar -4,050 menunjukkan adanya hubungan negatif antara belanja pemerintah dan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah sebesar 1% diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,05%, dengan asumsi variabel lain tetap. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pemerintah berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta



berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku. Efektivitas belanja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, efisiensi pelaksanaan program, serta pemerataan distribusi manfaat pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi kualitas belanja publik menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yusri, (2022), Nugroho et al., (2021), dan Zouhar et al., (2021) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Oleh karena itu, efektivitas belanja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas tata kelola, dan efisiensi pelaksanaannya sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pemerintah Secara Simultan terhadap Kemiskinan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara kapasitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah.

Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi berperan dalam menciptakan pendapatan dan peluang kerja, IPM meningkatkan kapasitas serta produktivitas masyarakat, sedangkan belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.

Dalam konteks Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan konektivitas, akses layanan publik, serta peluang ekonomi menjadi tantangan utama dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi belanja pemerintah yang produktif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nugroho et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan dipengaruhi oleh sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kualitas belanja pemerintah, dan program perlindungan sosial. Hasil ini juga konsisten dengan Yusri, (2022) yang menemukan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku memerlukan pendekatan terpadu melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan manusia yang berkualitas, dan pengelolaan belanja pemerintah yang efektif serta tepat sasaran.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pembangunan manusia, dan kebijakan fiskal pemerintah. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan intervensi pemerintah melalui kebijakan belanja publik merupakan faktor penting dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di wilayah kepulauan.

Namun demikian, arah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM yang positif menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan belum sepenuhnya mampu ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama pembangunan di Provinsi Maluku bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas manusia, tetapi juga memastikan tersedianya kesempatan ekonomi yang produktif serta pemerataan manfaat pembangunan.

Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah terbukti memiliki peran penting dalam menjelaskan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan belanja pemerintah yang efektif serta tepat sasaran.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat perspektif pembangunan multidimensional yang menempatkan kemiskinan sebagai fenomena yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kebijakan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM perlu didukung oleh mekanisme transformasi ekonomi agar mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku bahwa strategi pengurangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor produktif masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta optimalisasi belanja pemerintah pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah dalam menjelaskan tingkat kemiskinan, sehingga belum mencakup faktor lain seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, investasi, dan karakteristik struktural ekonomi daerah. Selain itu, cakupan penelitian yang hanya berfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku menyebabkan hasil penelitian lebih menggambarkan karakteristik wilayah kepulauan tersebut.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model analisis dengan memasukkan variabel ekonomi dan sosial lainnya serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti analisis spasial atau model dinamis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan.



Daftar Pustaka

- Andini, B. S., Siregar, Z., & Sahnan, M. (2025). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Media Manajemen Jasa.
- Damanik, D. B. N., & Suharianto, J. (2025). *Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan Melalui IPM sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan.
- Merdikawati, N., & Al Izzati, R. (2024). *Minimum Wage Policy and Poverty in Indonesia*. *The World Bank Economic Review*, 39(1), 191–210, <https://doi.org/10.1093/wber/lhae022>
- Nugraha, G., Rahayu, D. S., & Sukarso, A. (2025). *Kemiskinan dan Partisipasi Tenaga Kerja: Tantangan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5166>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). *Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challenges, and Reforms*. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Trimurti, C. P. (2025). *Impact Economic Growth, Human Capital, Employment Rate on Poverty in Indonesia*. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock – Reimagining Cooperation in a Polarized World*.
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*.
- Yusri, A. (2022). Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1). <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.249>
- Yusri, A. (2022). Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 61–76.
- Zouhar, Y., Jellema, J., Lustig, N., & Trabelsi, M. (2021). *Public Expenditure and Inclusive Growth: A Survey*. IMF Working Paper No. 2021/083. <https://doi.org/10.5089/9781513574387.001>